

Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Medan: Studi Kasus pada BKAD Provinsi Sumatera Utara

Nasirwan¹, Anggi Zahwa Yunita Lubis²

Andika Bhayangkara³, Endang Maya Sari Sitanggang⁴

^{1,2,3,4}Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Medan

anggizahway@gmail.com², andikabhayangkara79@mhs.unimed.ac.id³,

endangmayasarisitanggang@gmail.com⁴

ABSTRACT

This research aims to determine the influence of human resource competence, implementation of government accounting standards, government internal control systems, and use of information technology on the quality of local government financial reports. The research was conducted at the Regional Finance and Asset Agency (BKAD) of North Sumatra Province using a quantitative descriptive approach method. The population in this study were all employees at BKAD North Sumatra Province with a sample of 50 people. Data collection was carried out by distributing questionnaires to respondents. Data analysis used multiple linear regression with the help of SPSS software. The research results show that simultaneously, human resource competence, implementation of government accounting standards, government internal control systems, and use of information technology have a significant effect on the quality of local government financial reports. However, partially, only the government's internal control system and the use of information technology have a significant effect, while human resource competence and the application of government accounting standards do not have a significant effect. These findings underscore the importance of strengthening the internal control system to reduce the risk of material errors in financial reports, as well as the effective use of information technology to increase the accuracy and timeliness of reporting. Although human resource competency and the implementation of government accounting standards did not have a significant influence in this research, these results may be influenced by contextual factors such as the level of training and employee understanding of Government Accounting Standards in BKAD North Sumatra Province. The implication of this research is the need for continuous efforts to improve the quality of regional government financial reports through strengthening internal control systems, optimal use of information technology, and increasing human resource competency through training and socialization of effective government accounting standards. Further research can be conducted by expanding the sample scope and considering other factors that might influence the quality of local government financial reports.

Keywords : Human Resource Competency, Government Accounting Standards, Internal Control, Utilization of Information Technology, Quality of Regional Government Financial Reports.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kompetensi sumber daya manusia, penerapan standar akuntansi pemerintahan, sistem pengendalian internal pemerintah, dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian dilakukan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Sumatera Utara dengan menggunakan metode pendekatan deskriptif kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai yang berada di BKAD Provinsi Sumatera Utara dengan sampel berjumlah 50 orang. Pengumpulan data dilakukan dengan

menyebarkan kuesioner kepada responden. Analisis data menggunakan regresi linear berganda dengan bantuan software SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan, kompetensi sumber daya manusia, penerapan standar akuntansi pemerintahan, sistem pengendalian internal pemerintah, dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Namun secara parsial, hanya sistem pengendalian internal pemerintah dan pemanfaatan teknologi informasi yang berpengaruh signifikan, sedangkan kompetensi sumber daya manusia dan penerapan standar akuntansi pemerintahan tidak berpengaruh signifikan. Temuan ini menggarisbawahi pentingnya penguatan sistem pengendalian internal untuk mengurangi risiko kesalahan material dalam laporan keuangan, serta pemanfaatan teknologi informasi yang efektif untuk meningkatkan akurasi dan ketepatan waktu pelaporan. Meskipun kompetensi sumber daya manusia dan penerapan standar akuntansi pemerintah tidak berpengaruh signifikan dalam penelitian ini, hasil tersebut mungkin dipengaruhi oleh faktor kontekstual seperti tingkat pelatihan dan pemahaman pegawai terhadap Standar Akuntansi Pemerintah di BKAD Provinsi Sumatera Utara. Implikasi dari penelitian ini adalah perlunya upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah melalui penguatan sistem pengendalian internal, pemanfaatan teknologi informasi yang optimal, serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia melalui pelatihan dan sosialisasi standar akuntansi pemerintahan yang efektif. Penelitian lebih lanjut dapat dilakukan dengan memperluas cakupan sampel dan mempertimbangkan faktor-faktor lain yang mungkin mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Kata kunci : Kompetensi Sumber Daya Manusia, Standar Akuntansi Pemerintah, Pengendalian Internal, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

PENDAHULUAN

Kemajuan sistem keuangan kontemporer meningkatkan tuntutan masyarakat terhadap akuntabilitas dan transparansi keuangan pemerintahan. Sesuai dengan peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang sistem informasi keuangan daerah, pemerintah bertanggung jawab untuk menyediakan informasi keuangan daerah melalui situs resmi pemerintah yang dapat diakses secara online. Untuk memenuhi hak-hak publik, pemerintah harus mampu menjadi subjek pemberi informasi. Hal ini dilakukan untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah sesuai dengan janji yang diberikan.

Penelitian ini sangat penting karena peran penting laporan keuangan pemerintah daerah dalam mendukung tata kelola yang baik. Laporan keuangan yang baik menunjukkan bahwa pemerintah bertanggung jawab dan transparan, dan membantu pengambilan keputusan kebijakan. Laporan keuangan yang buruk dapat merusak kepercayaan publik, menghambat partisipasi warga, dan bahkan menimbulkan kecurigaan tentang korupsi di era di mana masyarakat semakin kritis dan terlibat. Oleh karena itu, menentukan komponen yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sangat penting untuk memperbaiki sistem pelaporan keuangan, meningkatkan akuntabilitas publik, dan, pada akhirnya, mendorong pertumbuhan daerah yang berkelanjutan.

Laporan keuangan yang baik dapat membantu kebijakan pemerintah di masa depan. Jika laporan keuangan sudah dapat membantu membuat keputusan, itu

akan mendorong kemajuan dan pengentasan kemiskinan. Opini Badan Pemeriksa Keuangan menunjukkan laporan keuangan berkualitas karena ada tingkatan penilaian laporan keuangan dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Tahap tertinggi dari penilaian ini adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), kemudian Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar (TW), dan Tidak Menyatakan Pendapat (TMP).

Salah satunya contohnya adalah pada Pemerintah Kota Medan dijelaskan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Medan tahun Anggaran 2017-2019 (www.bpk.go.id). Kemudian pada tahun 2020-2023 pemerintah Kota Medan berhasil memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan pemerintahannya dari BPK.

Pada daerah-daerah lain seperti daerah Kabupaten Simalungun, selama pemeriksaan BPK memberikan opini disclaimer untuk tahun anggaran 2017 dan 2018, serta opini WDP untuk tahun 2019 hingga 2021. Pada tahun anggaran 2017 dan 2018, BPK memberikan opini disclaimer bahwa kewajaran aset tetap tidak dapat dipercaya dan volume jasa konstruksi tidak mencukupi sebagai akibat dari kekurangan kas di bendahara pengeluaran, dan realisasi belanja dan jasa tidak dapat dianggap tidak wajar. Pada tahun anggaran 2019-2021, BPK memberikan opini WDP karena beberapa alasan. Ini termasuk pencatatan aset tetap dan persediaan yang tidak teratur, penatausahaan aset tambahan yang tidak teratur, perencanaan kegiatan yang tidak memadai, dan peningkatan pengeluaran karena kebijakan yang tidak diterapkan atau tidak diikuti dengan benar. Masalah di atas disebabkan oleh ketidakmampuan sumber daya manusia. Keterampilan akuntansi yang buruk, penyusunan laporan keuangan yang tidak memenuhi standar akuntansi pemerintahan, kurangnya pemahaman tentang sistem akuntansi keuangan daerah, dan kurangnya pemanfaatan teknologi informasi, semua faktor yang sangat memengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan kasus-kasus seperti ini BPK merekomendasikan kepada seluruh kepala daerah untuk menginstruksikan pejabat yang bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas dengan lebih hati-hati dan menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku dalam situasi seperti ini. Pemerintah telah berusaha menggunakan sistem akuntansi keuangan daerah untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah. Namun, beberapa PNS tidak memahami sistem akuntansi keuangan daerah. Ada banyak kejanggalan yang ditemukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) saat memeriksa laporan keuangan pemerintah; ini menimbulkan tuntutan masyarakat terhadap pemerintahan yang baik. Selain itu, ada banyak fenomena laporan keuangan pemerintah yang belum ditangani dengan data. mengikuti peraturan meningkatkan. Selain itu, pemerintah pusat dan daerah telah menerapkan akuntabilitas publik.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk meneliti Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi

Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah pada BKAD Provinsi Sumatera Utara.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan kompetensi sumber daya manusia, penerapan standar akuntansi pemerintah, sistem pengendalian internal dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

TINJAUAN LITERATUR

Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Laporan keuangan berkualitas merupakan produk dari proses akuntansi yang menyajikan informasi keuangan secara jelas dan bermanfaat bagi pengambil keputusan. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 menetapkan karakteristik kualitatif yang harus dipenuhi agar laporan keuangan mencapai kualitas yang diharapkan.

Ada empat ciri utama informasi laporan keuangan yang bermutu :

- a. Relevan: Informasi harus berguna dan dapat mempengaruhi keputusan dengan cara membantu mengevaluasi kejadian masa lalu, present, dan future (nilai prediktif), memperbaiki ekspektasi sebelumnya (nilai konfirmatif), serta tersedia tepat waktu bagi pengguna.
- b. Andal: Informasi harus terbebas dari kesalahan material dan penyajian yang menyesatkan, disajikan secara jujur (netral), dan dapat diverifikasi kebenarannya.
- c. Dapat Dibandingkan: Informasi harus konsisten dan sebanding dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau entitas lain agar bermanfaat bagi pengguna.
- d. Dapat Dipahami: Informasi harus disajikan secara jelas dan mudah dicerna oleh pengguna yang memiliki pengetahuan memadai tentang aktivitas dan lingkungan operasi entitas pelapor, serta kemauan untuk mempelajari informasi tersebut dengan seksama.

Untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, informasi yang disajikan harus relevan, andal, dapat dibandingkan, dan mudah dipahami sesuai standar yang ditetapkan dalam peraturan.

Kompetensi Sumber Daya Manusia

Kompetensi mengacu pada kemampuan seseorang untuk melaksanakan pekerjaan dengan baik. Tanpa kompetensi yang cukup, kinerja optimal tidak dapat dicapai. Dalam konteks organisasi, kompetensi sumber daya manusia (SDM) berarti kemampuan karyawan untuk menjalankan tugas secara efektif dan efisien demi mencapai tujuan perusahaan.

Untuk menghasilkan laporan keuangan pemerintah yang berkualitas, diperlukan SDM yang memiliki pemahaman mendalam tentang akuntansi sektor

publik. Pengetahuan tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) menjadi faktor kunci dalam penyusunan laporan keuangan yang andal.

Sebuah studi oleh Ramadhani dan Halmawati (2023) menemukan adanya hubungan positif antara kompetensi SDM dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Temuan ini mengindikasikan bahwa semakin kompeten pegawai di bidang akuntansi dan keuangan, semakin tinggi pula kualitas laporan keuangan yang dihasilkan.

Kompetensi SDM memainkan peran vital dalam memastikan kualitas pelaporan keuangan di sektor pemerintah. Investasi dalam pengembangan keterampilan dan pengetahuan akuntansi para pegawai dapat membantu meningkatkan keandalan dan kegunaan informasi keuangan yang disajikan.

Standar Akuntansi Pemerintah

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yang menjadi acuan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan instansi pemerintah. SAP mencakup prinsip-prinsip seperti basis akuntansi, nilai historis, realisasi, substansi mengungguli bentuk formal, periodisitas, konsistensi, pengungkapan lengkap, dan penyajian wajar.

Bastian (2020) mendefinisikan SAP sebagai aturan hukum yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah Indonesia. Sementara itu, Mahmudi (2019) menjelaskan SAP sebagai prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam proses penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah.

Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Samsiah et al. (2023) di Provinsi Riau menemukan adanya pengaruh yang signifikan dari penerapan SAP terhadap kualitas laporan keuangan. Hasil ini menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap SAP dapat meningkatkan keandalan, relevansi, dan daya banding informasi keuangan yang disajikan.

Dengan demikian, SAP memainkan peran penting dalam memastikan bahwa laporan keuangan pemerintah disusun secara konsisten dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Penerapan SAP secara tepat dapat meningkatkan kualitas dan kegunaan informasi keuangan bagi para pemangku kepentingan..

Sistem Pengendalian Internal Pemerintah

Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008. SPIP didefinisikan sebagai proses yang integral dan berkelanjutan yang dilaksanakan oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien.

Komponen-komponen SPIP yang diadopsi dari praktik internasional meliputi :

- a. Lingkungan Pengendalian
- b. Penilaian Risiko
- c. Kegiatan Pengendalian

d. Informasi dan Komunikasi

e. Pemantauan Pengendalian Intern

Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Puja et al. (2023) pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Deli Serdang menemukan adanya pengaruh positif dari Sistem Pengendalian Internal Pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan. Hasil ini menggarisbawahi peran penting pengendalian internal yang efektif dalam memitigasi risiko salah saji material dan meningkatkan akuntabilitas pelaporan keuangan.

Sistem Pengendalian Internal Pemerintah merupakan kerangka kerja yang komprehensif untuk memastikan keandalan, efisiensi, dan efektivitas operasi serta kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Implementasi SPIP yang solid dapat berkontribusi pada peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Pemanfaatan Teknologi Informasi

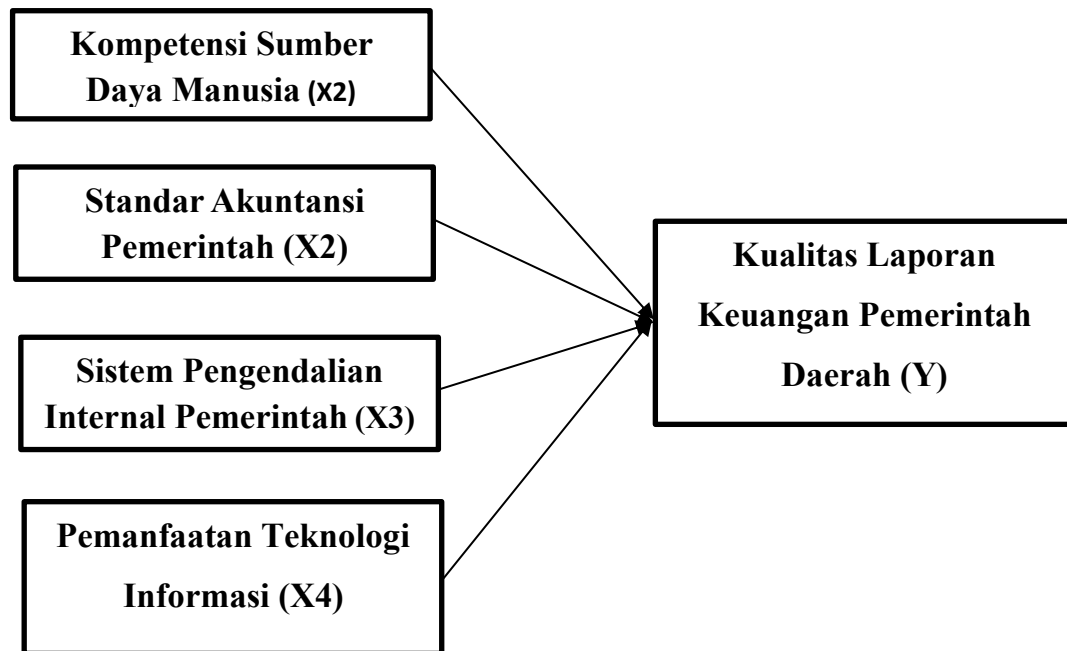
Pemanfaatan teknologi informasi memiliki dampak signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Teknologi informasi dianggap sebagai alat yang sangat membantu dalam menghasilkan laporan keuangan yang andal dan relevan.

Dengan adanya dukungan perangkat keras komputer dan perangkat lunak, pemerintah daerah dapat melaksanakan tugas-tugas pelaporan keuangan secara lebih efisien dan tepat waktu (Imelda et al., 2017). Otomatisasi proses akuntansi dapat mengurangi risiko kesalahan manusia dan meningkatkan konsistensi data.

Sebuah studi yang dilakukan oleh Siswati et al. (2022) menemukan adanya hubungan positif antara pemanfaatan teknologi informasi dengan kualitas laporan keuangan. Hasil ini menyoroti potensi teknologi untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan ketepatan waktu dalam penyusunan laporan keuangan.

Investasi dalam teknologi informasi yang tepat dapat menjadi strategi yang efektif bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan mereka. Dengan memanfaatkan alat dan sistem yang canggih, entitas dapat mengoptimalkan proses akuntansi dan memastikan penyajian informasi keuangan yang andal dan tepat waktu kepada para pemangku kepentingan.

Kerangka Penelitian



Hipotesis

H₁ : Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

H₂ : Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

H₃ : Sistem Pengendalian Internal Pemerintah berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

H₄ : Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan pembahasan deskriptif kuantitatif dengan objek penelitian meliputi persepsi mengenai kompetensi sumber daya manusia, standar akuntansi pemerintah, sistem pengendalian internal, pemanfaatan teknologi informasi dan kualitas laporan keuangan pemerintah. Lokasi penelitian dilakukan di BKAD Provinsi Sumatera Utara.

Data utama penelitian berupa data persepsi kompetensi sumber daya manusia, standar akuntansi pemerintah, sistem pengendalian internal, pemanfaatan teknologi informasi dan kualitas laporan keuangan pemerintah melalui kuesioner terstruktur. Data pendukung penelitian berupa referensi penelitian terdahulu, jurnal, dan artikel relevan yang diperoleh dari sumber pustaka melalui telaah pustaka dan internet melalui browsing, serta studi kepustakaan dan copy data.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linear berganda dengan bantuan software SPSS.

Teknik Analisis

Data Normalitas

Normalitas dihitung untuk mengetahui apakah data yang terkumpul berdistribusi normal. Jika data berdistribusi normal maka hasil penghitungan statistik dapat digeneralisasikan untuk populasi penelitian. Nalisis normalitas data menggunakan rumus Kolmogorov Smirnov SPSS For windows. Pengambilan keputusan normal atau tidaknya data diputuskan dengan melihat nilai observasi (observasi) dengan nilai expected (harapan/ideal). Jika nilai Asymp, Sig lebih besar dari 0,05 maka disimpulkan data yang diuji mempunyai distribusi normal. Sebaliknya, jika lebih kecil dari 0,05 maka data mempunyai distribusi yang tidak normal.

Linieritas

Linieritas diukur untuk mengetahui linieritas hubungan antara variabel bebas dengan terikat, yaitu Kompetensi Sumber Daya Manusia (X1), Standar Akuntansi Pemerintah (X2), Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (X3), Pemanfaatan Teknologi Informasi (X4) dengan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y). Kriteria yang digunakan adalah apabila harga p pada jalur dev. From Linierity lebih besar dari harga $\alpha = 0,05$ dinyatakan bahwa regresi linier, dan sebaliknya jika p lebih kecil dari harga $\alpha = 0,05$ dinyatakan bahwa regresinya tidak linier. Teknik yang digunakan dalam hal ini adalah analisis korelasi product moment. Analisis ini akan digunakan dalam menguji besarnya hubungan dan kontribusi variabel X terhadap variabel Y. Untuk mengetahui derajat hubungan antar variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia (X1), Standar Akuntansi Pemerintah (X2), Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (X3), Pemanfaatan Teknologi Informasi (X4) dengan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y) dilakukan penyebaran angket. Untuk mengetahui hubungan antara variabel X terhadap Y digunakan teknik korelasi.

Uji Hipotesis

Untuk menguji hipotesis penelitian, digunakan analisis regresi sederhana. Analisis ini digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y). Pengujian signifikansi dilakukan dengan melihat nilai probabilitas (p-value). Jika p-value lebih kecil dari 0,05, maka pengaruh variabel X terhadap Y dinyatakan signifikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

Unstandardized Residual

N		50
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.33529209
Most Extreme Differences	Absolute	.194
	Positive	.149
	Negative	-.194
Test Statistic		.194
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^c

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel di atas, dapat diketahui bahwa nilai AsympSig (2-tailed) adalah sebesar 0,200 yang mana lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal dan dapat digunakan dalam penelitian.

Uji Multikolinearitas

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	2.478	.344		7.209	.000		
KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA	.034	.159	.024	.213	.832	.922	1.085
STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH	.249	.125	.225	1.988	.053	.909	1.101
SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH	-.637	.118	-.637	-5.416	.000	.842	1.188

PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI	-0.576	.131	-.503	-4.379	.000	.885	1.130
------------------------------------	--------	------	-------	--------	------	------	-------

a. Dependent Variable: KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Berdasarkan hasil perhitungan diatas, dapat diketahui bahwa nilai Tolerance dari setiap variabel independen lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF lebih kecil dari 10. Secara berurutan nilai tolerance dan VIF pada variabel kompetensi SDM adalah sebesar 0,922 dan 1,085, pada variabel penerapan SAP sebesar 0,909 dan 1,101, pada variabel sistem pengendalian internal sebesar 0,842 dan 1,188, dan pada variabel pemanfaatan teknologi informasi sebesar 0.885 dan 1,130. Maka dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan bebas dari multikolinearitas.

Uji Heteroskedastisitas

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardi zed Coefficien ts	t	Sig.	Collinearit y Statistics	
	B	Std. Error				Toleranc e	VIF
1 (Constant)	2.478	.344		7.209	.000		
KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA	.034	.159	.024	.213	.832	.922	1.085
STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH	.249	.125	.225	1.988	.053	.909	1.101
SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH	-.637	.118	-.637	-5.416	.000	.842	1.188
PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI	-.576	.131	-.503	-4.379	.000	.885	1.130

a. Dependent Variable: KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Hasil perhitungan di atas menunjukkan nilai signifikansi uji heterkedastisitas (sig t) terdapat nilai variable X1 dan nilai X2 lebih besar dari 0,05 artinya tidak terdapat gejala heteroskedastisitas sedangkan variable X3 dan variable X4 lebih kecil dari 0,05 artinya terdapat gejala heteroskedastisitas.

Uji Koefisien Determinasi

Model Summary^b

Mo del	R	R Squar e	Adjuste dR Square	Std. Errorof the Estimat e	Change Statistics					Durbin- Watso n
					R Square Change	F Chan ge	df1	df2	Sig. F Change	
1	.689 ^a	.475	.429	.350	.475	10.194	4	45	.000	.550

a. Predictors: (Constant), PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI, KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA, STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH, SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH

b. Dependent Variable: KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Berdasarkan hasil perhitungan dapat diketahui bahwa nilai koefisien determinasi adalah sebesar 0,475 (47,5%) yang menggambarkan bahwa persentase sumbang pengaruh variabel independent (kompetensi SDM, penerapan SAP, sitem pengendalian internal, dan pemanfaatan teknologi) terhadap variabel kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sebesar 47,5% atau variabel independen (kompetensi SDM, penerapan SAP, sitem pengendalian internal, dan pemanfaatan teknologi) mampu menjelaskan 47,5% variabel dependen (kualitas laporan keuangan pemerintah daerah). Adapun 52,5% lainnya tidak dijelaskan dalam penelitian ini dipengaruhi oleh variabel-variabel lain di luar variabel yang diteliti.

Uji Hipotesis

Regresi Linear Berganda

Unstandardized Coefficients				Standardized Coefficient	Collinearity Statistics		
Model	B	Std. Error	Beta	t	Sig.	olerance	VIF
1 (Constant)	2.478	.344		7.209	.000		
KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA	.034	.159	.024	.213	.832	.922	1.085
STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH	.249	.125	.225	1.988	.053	.909	1.101

SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH	.637	.118	-.637	-5.416	.000	.842	1.188
PEMANFAATAN TEKNOLOGIINFORMASI	.576	.131	-.503	-4.379	.000	.885	1.130

a. Dependent Variable: KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Berdasarkan pengolahan data dengan menggunakan spss, diperoleh hasil persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 2,478 + 0,034 X_1 + 0,249 X_2 + 0,637 X_3 + 0,576 X_4$$

Persamaan regresi di atas memperlihatkan hubungan antara variabel independent yaitu kompetensi SDM, penerapan SAP, sistem pengendalian internal, dan pemanfaatan teknologi terhadap variabel dependen yaitu kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Dari persamaan tersebut dapat diambil kesimpulan:

Nilai konstanta adalah 2,478 artinya jika tidak terjadi perubahan pada variabel independent maka nilai kualitas laporan keuangan pemerintah daerah adalah sebesar 2,478.

Nilai koefisien variabel kompetensi SDM adalah 0,034. Artinya jika variabel kompetensi SDM (X_1) mengalami kenaikan 1% dengan asumsi variabel independent lainnya adalah tetap, maka nilai kualitas laporan keuangan pemerintah daerah akan meningkat sebesar 0,034, demikian juga sebaliknya. Hal ini menunjukkan adanya pengaruh positif antara variabel kompetensi SDM dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Nilai koefisien variabel penerapan SAP adalah 0,249%. Artinya jika nilai variabel penerapan SAP (X_2) mengalami kenaikan 1% dengan asumsi variabel independent lainnya adalah tetap, maka nilai kualitas laporan keuangan pemerintah daerah akan meningkat sebesar 0,249%, demikian juga sebaliknya. Hal ini menunjukkan adanya pengaruh positif antar variabel penerapan SAP dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Nilai koefisien variabel sistem pengendalian internal adalah 0,637. Artinya jika variabel sistem pengendalian internal (X_3) mengalami kenaikan 1% dengan asumsi variabel independent lainnya adalah tetap, maka nilai kualitas laporan keuangan pemerintah daerah akan meningkat sebesar 0,637, demikian juga sebaliknya. Hal ini menunjukkan adanya pengaruh negatif antara variabel sistem pengendalian internal dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Nilai koefisien variabel pemanfaatan teknologi adalah 0,576. Artinya jika variabel pemanfaatan teknologi (X_4) mengalami kenaikan 1% dengan asumsi variabel independent lainnya adalah tetap, maka nilai kualitas laporan keuangan pemerintah daerah akan meningkat sebesar 0,576, demikian juga sebaliknya. Hal ini menunjukkan adanya pengaruh negatif antara variabel pemanfaatan teknologi dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Uji T (Parsial)

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa nilai t hitung untuk variable X1 adalah 0,024 dengan signifikansi 0,213, untuk variable X2 adalah 0,225 dengan signifikansi 1,988, untuk variabel X3 adalah -5,416 dengan nilai signifikansi 0,000, untuk variabel X4 adalah -4,379 dengan nilai signifikansi 0,000. Dapat disimpulkan bahwa variabel X1 dan variabel X2 secara parsial tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sedangkan Variabel X3 dan variabel X4 secara parsial berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Uji F (Simultan)

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	4.991	4	1.248	10.194	.000 ^b
	Residual	5.509	45	.122		
	Total	10.500	49			

a. Dependent Variable: KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

b. Predictors: (Constant), PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI, KOMPETENSI SUMBERDAYA MANUSIA, STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH, SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui nilai F hitung sebesar 10,194 dengan nilai sigifikansi 0,000. Sedangkan nilai F table yang dapat dilihat pada table statistik F adalah 2,81. Karena nilai F hitung > F table maka dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan teknologi, kompetensi SDM, standar akuntansi pemerintah dan system pengendalian internal pemerintah berpengaruh secara simultan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Haryono (2022) yang menyatakan bahwa sistem pengendalian internal dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini mengindikasikan bahwa penguatan sistem pengendalian internal dapat mengurangi risiko kesalahan material dalam laporan keuangan, sementara pemanfaatan teknologi informasi yang efektif dapat meningkatkan akurasi dan ketepatan waktu pelaporan.

Namun, temuan bahwa kompetensi sumber daya manusia dan penerapan standar akuntansi pemerintah tidak berpengaruh signifikan berbeda dengan penelitian Wardani et al. (2021) yang menemukan keduanya berpengaruh positif. Perbedaan ini mungkin disebabkan oleh faktor kontekstual seperti tingkat pelatihan dan pemahaman pegawai terhadap SAP di BKAD Provinsi Sumatera Utara. Ini menggarisbawahi pentingnya pelatihan berkelanjutan dan sosialisasi SAP yang efektif.

KESIMPULAN

Artikel ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kompetensi sumber daya manusia, penerapan standar akuntansi pemerintahan, sistem pengendalian internal pemerintah, dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. Penelitian tersebut dilakukan di Badan Keuangan Provinsi (BKAD) Provinsi Sumut. Penelitian ini menggunakan data primer yang dikumpulkan dari 50 pegawai BKAD melalui penyebaran kuesioner. Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda dengan menggunakan software SPSS. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia, penerapan standar akuntansi pemerintahan, sistem pengendalian internal pemerintah, dan pemanfaatan teknologi informasi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. Studi ini juga menyoroti pentingnya pelatihan berkelanjutan dan sosialisasi standar akuntansi pemerintahan yang efektif bagi karyawan.

Kualitas laporan keuangan pemerintah sangat penting untuk akuntabilitas dan transparansi tata kelola publik serta mempengaruhi pengambilan keputusan. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa kualitas laporan tersebut dipengaruhi oleh kompetensi sumber daya manusia, standar akuntansi pemerintahan, sistem pengendalian internal pemerintah, dan pemanfaatan teknologi informasi. Temuan penelitian ini juga sejalan dengan penelitian sebelumnya, yang menekankan pentingnya faktor-faktor tersebut terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. Selain itu, penelitian ini merekomendasikan penggabungan pelatihan yang efektif dan sosialisasi standar akuntansi pemerintah untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan.

Penelitian ini memberikan wawasan berharga mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah, menekankan pentingnya kompetensi sumber daya manusia, standar akuntansi pemerintahan, sistem pengendalian internal pemerintah, dan pemanfaatan teknologi informasi. Temuan penelitian ini menyoroti perlunya pelatihan berkelanjutan dan sosialisasi standar akuntansi pemerintahan yang efektif bagi karyawan. Hal ini berkontribusi terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah secara keseluruhan, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, I. (2020). Akuntansi sektor publik: Suatu pengantar (Edisi keempat). Jakarta: Salemba Empat.
- Haryono, U. (2022). Pengaruh kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian internal, dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 10(2), 379-392.
- Imelda, L., Kalangi, L., & Tinangon, J. J. (2017). Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Kepulauan Talaud. *Syria Studies*, 7(1), 1-12.

- Mahmudi. (2019). Akuntansi sektor publik (Edisi revisi). Yogyakarta: UII Press.
- Puja, K. L., Afrah, J., & Iqlima, A. (2023). Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah (Studi pada OPD Kabupaten Deli Serdang). *Jurnal Mahasiswa Akuntansi Samudra (JMAS)*, 2(1), 1-14. <https://doi.org/10.55047/jmas.v2i1.47>
- Ramadhani, D., & Halmawati. (2023). Pengaruh kompetensi sumber daya manusia, penerapan standar akuntansi pemerintah dan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan: Studi pada OPD Kabupaten Simalungun. *Jurnal Nuansa Karya Akuntansi (JNKA)*, 5(1), 1-12. <https://doi.org/10.55997/jnka.v5i1.211>
- Samsiah, S., Mustika, A. P., & Winarni, W. (2023). Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah Provinsi Riau. *Jurnal Ilmiah Akuntansi (JIA)*, 8(1), 101-114. <https://doi.org/10.23887/jia.v8i1.48630>
- Siswati, A. S. A., Suhaji, S., & Ginanjar, R. G. R. (2022). Analisis kinerja keuangan pada perusahaan transportasi (Studi kasus pada PT. Blue Bird, Tbk tahun 2015-2020). *Jisos: Jurnal Ilmu Sosial*, 1(7), 419-428.
- Wardani, D. K., Andriyani, I., & Sulistyowati, N. W. (2021). Pengaruh kompetensi sumber daya manusia, penerapan standar akuntansi pemerintahan, dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 22(1), 1-10. <https://doi.org/10.20961/bestuur.42732>.